

Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar

Christiany Juditha

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Jl. Prof. Dr. Abdurahman Basalamah II No. 25, Makassar 90231
Email: ithajuditha@yahoo.com

Abstrak: *The diversity of culture, religion, and language Indonesia often leads to ethnic conflict. Chinese and Bugis Makassar, for example, are often involved in such conflict. The main causes are the strong stereotypes and prejudices between them. Actually, there have been some efforts to establish intercultural communication. This based on an argument that if the ethnics could establish contact or interaction and develop a meaningful intercultural communication, it can minimize cultural misunderstandings and reduce stereotypes, prejudices and ethnocentric among them.*

Keywords: *Bugis-Makassar, Chinese, intercultural communication, prejudice, stereotypes*

Abstrak: *Keberagaman budaya, agama dan bahasa di Indonesia seringkali menimbulkan konflik. Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar, misalnya, sering terkait dengan konflik tersebut. Penyebab utama persoalan ini adalah stereotip dan prasangka yang kuat di antara kedua etnis. Sebenarnya, telah ada usaha-usaha menjalin komunikasi antar budaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Usaha ini didasarkan pada anggapan bahwa jika kedua etnis dapat menjalin kontak atau interaksi dengan mengembangkan komunikasi antar budaya yang bermakna, maka kesalahpahaman budaya dapat diminimalkan sebagai upaya untuk mereduksi perilaku stereotip, prasangka, dan etnosentris.*

Kata Kunci: *Bugis-Makassar, komunikasi antar budaya, prasangka, stereotip, Tionghoa*

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Indonesia yang sudah dikenal sejak dahulu. Maknanya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ragam budaya Indonesia merupakan kekayaan unik yang tidak dimiliki setiap bangsa di dunia. Ragam ini terlihat dari kondisi sosio kultural dan geografisnya yang terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil, populasi penduduk lebih dari 210 juta jiwa, 300 suku yang menggunakan hampir 700 lebih bahasa yang berbeda serta agama dan kepercayaan yang beragam. Fishman pun memandang Indonesia sebagai raksasa sosiolinguistik dan negara multikultur

terbesar di dunia (Yaqin, 2005, h. 3).

Namun keberagaman Indonesia ini bukan tanpa resiko. Perbedaan yang ada justru sering diletakkan sebagai pemicu masalah dan sumber konflik. Konflik agama, etnis dan antar golongan pun sering terjadi. Konflik ini sering sulit dicari jalan keluarnya karena masing-masing pihak merasa diri paling benar.

Kondisi alami kemajemukan melahirkan corak dan pengaruh yang berbeda-beda. Kemajemukan etnis pun melahirkan pengelompokan-pengelompokan intraetnik karena setiap etnik memiliki perasaan

superior daripada etnis lain, misalnya, orang Jawa merasa sebagai orang bertabiat halus, orang Ambon merasa sebagai pekerja keras, orang Bugis Makassar merasa sebagai pelaut ulung, dan orang Padang merasa sebagai pedagang ulung. Hal ini dapat melahirkan prasangka-prasangka sosial yang muncul dari kondisi tidak saling kenal dan kekhawatiran berwujud stereotip, jarak sosial, dan sikap diskriminasi terhadap etnik lain (Liliweri, 1994, h. 3-4).

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri era SBY, Marty Nata Legawa, mengklaim bahwa Indonesia telah menjalankan toleransi, masuk dalam kategori negara moderat yang berkomitmen kuat menjalankan prinsip demokrasi dan toleransi, menghormati hak asasi manusia serta menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Namun, dalam siaran pers awal Mei 2012, Elaine Pearson, Wakil Direktur *Human Rights Watch* (HRW) Asia, mendesak negara-negara anggota Dewan HAM PBB bisa menekan dan mengajukan pertanyaan keras terkait perkembangan HAM di Indonesia. Pasalnya, selama empat tahun terakhir kekerasan dan diskriminasi di Indonesia terhadap kelompok minoritas yang justru semakin memburuk. Menurut catatan HRW, insiden kekerasan dan penyerangan yang terjadi di Indonesia tahun 2007 mencapai 135 kasus, tahun 2010 naik menjadi 216 kasus, dan melonjak menjadi 244 kasus pada tahun 2011 (Kompas, 2012, h. 8).

Etnis Tionghoa merupakan salah satu golongan minoritas di Indonesia yang

sering mendapat perlakuan diskriminatif dari golongan mayoritas. Etnis ini memberi kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi. Namun, kesenjangan ekonomi yang berujung timbulnya kesenjangan sosial justru menimbulkan konflik antar etnis. Menurut Amy Chua, profesor dari Yale University, adanya etnis minoritas yang mendominasi pasar bisa diramalkan akan terjadi serangan terhadap kelompok tersebut. Masalahnya ada pada *market-dominant minorities*, yaitu keberadaan kelompok minoritas kaya raya yang diperolehnya dari pasar ekonomi (Budiman, 2004, h. 45).

Konflik antar suku tidak asing bagi kita. Konflik antar etnis pribumi seperti Madura dan Dayak, Aceh dan Jawa, Bali dan Sasak, maupun antar etnis pribumi dan nonpribumi, seperti Jawa dan Tionghoa, serta Bugis Makassar dan Tionghoa masih kerap terjadi. Sejarah pertikaian antar etnis skala besar terjadi antara etnis Madura dan Dayak di Kalimantan, yaitu tragedi Sambas dan Sampit. Ribuan jiwa meninggal, harta benda habis serta puluhan ribu orang menjadi pengungsi di negara sendiri. Kerugian material dan psikis mengemuka. Konflik antara kedua etnik tersebut muncul karena kecemburuan sosial. Suku Dayak sebagai suku pribumi yang mayoritas menduduki kelas sosial yang lebih rendah dari suku Madura sebagai pendatang.

Konflik lainnya yang juga paling sering terjadi adalah antara warga pribumi dan warga nonpribumi, khususnya etnis keturunan Tionghoa. Di Indonesia, orientasi multikulturalisme sebagai konsep

ideal yang telah jelas digambarkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu mengakomodasi warga etnis keturunan Tionghoa sebagai bagian integral.

Warga keturunan Tionghoa belum diterima secara penuh sebagai orang Indonesia. Sasaran kerusuhan, perusakan, penjarahan, dan pembakaran sering dialamatkan pada rumah-rumah, toko-toko, dan kantor-kantor perusahaan milik etnis keturunan Tionghoa. Dibandingkan dengan sekian etnis yang ada di kota-kota di Indonesia, etnis keturunan Tionghoa paling sering menjadi sasaran amuk massa warga pribumi. Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta menunjukkan bukti bagaimana harta benda warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran dalam kerusuhan tersebut.

Konflik antar etnis banyak menimbulkan kerugian fisik dan psikis. Faktor-faktor penyebab konflik umumnya sulit dipetakan dan sangat kompleks. Satu konflik biasanya dipicu oleh satu masalah tertentu. Namun, sebenarnya konflik tersebut dilatarbelakangi oleh konteks situasi dan kondisi makro yang meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Konflik seringkali mendasari munculnya perilaku agresi antar kelompok. Konflik antar kelompok seringkali dipicu oleh keadaan dari dalam dan luar kelompok, sehingga anggota kelompok diwarnai oleh prasangka (Helmi & Soedardjo, 1998). Salah satu teori prasangka adalah *realistic conflict theory* (Baron & Byrne, 2004, h. 213) yang memandang prasangka berakar dari kompetisi sejumlah kelompok sosial

terhadap sejumlah komoditas maupun peluang. Jika kompetisi berlanjut, maka masing-masing anggota akan memandang anggota kelompok lain sebagai musuh. Jika terdapat isyarat agresi, maka perilaku agresi akan muncul.

Konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara dua etnis berbeda dan laju pembangunan bangsa memperlihatkan porsi yang tidak seimbang. Fungsi komunikasi antar etnis juga tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, benteng pertahanan kebangsaan dalam bentuk identitas dan sistem nilai itu semakin merapuh. Hal itu berarti komunikasi makin lama makin kehilangan kekuatan dan daya rekatnya. Perbedaan berlatar belakang multikultural yang dapat memicu konflik tersebut memerlukan komunikasi untuk membentuk interaksi sosial yang sepeham dan efektif sehingga tingkat saling pengertian antar etnis atau antar golongan dapat tercipta.

Stereotip, prasangka, dan diskriminasi seringkali mengawali kebencian dan kerusuhan rasial. Di Indonesia, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Tionghoa saja, namun juga etnis lain, seperti Batak, Minangkabau, Jawa, Sunda, Madura, dan Dayak. Hal ini bisa terjadi jika etnis-etnis tersebut menetap di suatu wilayah yang di dalamnya dihuni etnis mayoritas. Ditilik dari sudut sosio-historis, bobot masing-masing kasus berbeda-beda.

Pada kasus etnis Tionghoa, pandangan stereotip tak jarang dialamatkan pada keraguan eksistensial terhadap status atau posisi mereka sebagai salah satu

komponen bangsa. Pada titik ini, secara ideologis, pandangan stereotip tersebut terkait dengan kesangsian orang terhadap komitmen nasional mereka. Selanjutnya, cara pandang ini dapat mengarah pada kecurigaan keterlibatan etnis Tionghoa dalam determinasi proses-proses politik dan ekonomi sampai keterlibatan mereka di lingkaran kekuasaan negara. Pandangan stereotip ini, baik secara sosio-historis, budaya, ekonomi, dan politik, berhasil memproduksi dan mereproduksi mitos-mitos yang membuat substansi permasalahannya semakin sulit disentuh (Siregar, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013, h. 1) juga membahas tentang konflik etnis Tionghoa dan Jawa. Penelitian yang berjudul “Konflik dan Kecemburuan Sosial antara Etnis Tionghoa dan Masyarakat Pandhalungan di Daerah Besuki Situbondo” tersebut menunjukkan bahwa warga pribumi sering kali mengalami kecemburuan jika ada etnis pendatang yang lebih dominan dalam berbagai lingkup kehidupan mereka. Pluralitas masyarakat sangat rentan terhadap konflik yang bisa mengarah pada kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Konflik etnis Tionghoa dan suku Pandhalungan tersebut terjadi pada tahun 1967 di Situbondo, Besuki, dan Panarukan. Tahun 1996, kejadian serupa terjadi lagi hingga menyebabkan kerusakan dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Akar konflik yang beragam memengaruhi timbulnya kekerasan. Situasi politik nasional pada waktu itu ikut memicu

terjadinya konflik, emosi masyarakat pun mudah tersulut. Faktor kesenjangan ekonomi antara orang keturunan Tionghoa dan pribumi juga menjadi penyebab konflik. Kesenjangan ekonomi sebagai penyebab kecemburuan sosial akhirnya melahirkan konflik laten. Faktor inilah yang masih melekat pada masyarakat Pandhalungan terutama di kecamatan Besuki. Masyarakat Pandhalungan berasumsi bahwa orang-orang keturunan Tionghoa saat ini juga mendominasi mereka, terutama dalam hal ekonomi.

Penelitian lain yang memiliki kemiripan kasus dilakukan oleh Prihartanti, Taufik dan Thoyibi (2009, h. 1) dengan judul “Mengurai Akar Kekerasan Etnis pada Masyarakat Pluralis”. Penelitian ini bertujuan memahami faktor-faktor personal, sosial, budaya, dan politis yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan antara etnis Jawa dan Tionghoa. Hasilnya menunjukkan bahwa, *pertama*, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kekerasan etnis adalah faktor perbedaan individual (etnisitas) dan situasional. *Kedua*, jati diri etnis Jawa banyak dipengaruhi oleh peristiwa sejarah. Mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh penjajah Belanda dengan memasukkannya ke dalam kategori *inlander* yang mewakili warga kelas ketiga dan menjadi subordinat orang-orang Belanda dan etnis Tionghoa. Kategori sebagai warga kelas tiga ini memengaruhi pembentukan *self-concept* negatif pada etnis Jawa. Sementara itu, etnis Tionghoa membangun *self-concept* yang positif berdasarkan ajaran-ajaran Taoisme.

Ketiga, pola sikap dan perilaku antar etnis banyak diwarnai oleh relasi yang tidak *mindful*, sehingga rentan terhadap munculnya kekerasan. *Keempat*, budaya dan agama memang tidak secara langsung mencetuskan kekerasan, namun budaya dan agama dapat berperan dalam pembentukan jatidiri yang berpengaruh pada *self-concept* dan mewarnai pola perilaku dan relasi yang dapat menumbuhkan perasaan negatif dan memicu kekerasan.

Hasil beberapa penelitian tentang konflik etnis Tionghoa dan Jawa yang telah dipaparkan di atas memiliki kemiripan akar permasalahan konflik yaitu masalah ekonomi dan situasional sosial. Konflik etnis Tionghoa dan Bugis Makassar pun memiliki latar belakang masalah yang kurang lebih sama. Etnis Tionghoa yang dikenal sebagai pendatang menguasai pasar perekonomian di tanah air. Hal itu memicu lahirnya kecemburuan sosial masyarakat setempat yang tidak jarang berujung pada konflik yang berkepanjangan.

Keberadaan kelompok-kelompok fundamentalisme etnis membuat peluang terjadinya konflik budaya semakin besar. Brown (1997, h. 80) mengatakan bahwa bangkitnya nasionalisme etnis pada satu kelompok akan dilihat sebagai ancaman bagi kelompok lainnya dan akan menciptakan perkembangan dari sentimen yang sama di tempat-tempat lainnya. Jika sudah seperti ini, maka pertentangan antar etnis akan semakin besar. Biasanya, kelompok minoritaslah yang akan menjadi korban. Di sisi lain, paham nasionalisme yang didasarkan pada fundamentalisme

etnis akan membuat suatu kelompok dapat dengan mudah memobilisasi massa dan membentuk suatu pasukan yang memiliki motivasi berperang tinggi. Bila demikian, maka kekerasan akan menjadi suatu kekuatan yang sangat kejam dan tidak lagi bisa terelakkan.

PEMBAHASAN

Diskriminasi Etnis Tionghoa di Makassar

Etnis Tionghoa telah hidup berabad-abad lamanya dan menjadi bagian dari warga kota Makassar. Orang-orang Tionghoa datang ke Makasar dan sekitarnya pada masa Dinasti Tang, abad ke-15. Mereka datang dari Hokkian di daratan Tionghoa secara bertahap pada masa pemerintahan kerajaan Gowa. Semula mereka datang hanya untuk berdagang, namun lama-kelamaan mulai bermukim di pesisir-pesisir pantai. Bahkan, dalam naskah *Suré Galigo*, disebutkan bahwa Sawerigading, tokoh utama dalam cerita tersebut, berlayar ke negeri Tiongkok untuk menjemput calon isterinya. Sejarah juga mencatat kemajuan ekonomi etnis Tionghoa dibanding ketika mereka pertama kali menjejaki kota Makassar dalam keadaan miskin pada 1676. Etnis ini pun diterima dengan tangan terbuka. Amanna Gappa, salah seorang petinggi kerajaan setempat, menikah dengan seorang putri Tionghoa (Pasolle, 2009). Ini berarti telah ada hubungan antara orang Bugis Makassar dengan Tionghoa beberapa abad lampau, sebelum Islam masuk.

Hingga kini, keberadaan masyarakat Tionghoa telah diakui pemerintah daerah.

Kawasan peTionghoan seluas 44 hektar pun dibangun pemerintah. Gapura bertuliskan “Tionghoa Town, Gerbang Persaudaraan Indonesia-Tionghoa” dan berdiri kokoh di ujung Jalan Jampea Makassar menjadi perlambang persahabatan antara warga pribumi dan warga keturunan Tionghoa.

Kawasan peTionghoan di Makassar diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun lalu. Namun, baru secara sah diakui keberadaannya setelah diresmikan Wali Kota Makassar, Amiruddin Maula, sebagai salah satu objek wisata kota pada pertengahan Februari tahun 2003. Kawasan ini termasuk simbol kemapanan bagi warga keturunan Tionghoa karena mereka terdiri atas empat suku, yaitu *Kanton* (tukang emas), *Hainan* (warung kopi), *Hokkian*, dan *Hakka/Khe* (pedagang) yang menguasai hampir semua jenis usaha, mulai dari bisnis barang kelontong, grosir, hingga tempat hiburan malam. Sejak lama, sebagian besar warga keturunan Tionghoa bermukim dan mengelompok di belakang Jalan Jampea dan Jalan Bonerate yang menjadi kawasan permukiman, perkantoran, dan

restoran (Makassar Doeloe Makassar Kini Makassar Nanti, 2000, h. 151). Kehadiran kawasan peTionghoan memang diharapkan dapat menjadi potensi pariwisata, tetapi sekaligus menjadi pemicu terhambatnya proses pembauran atau asimilasi antara etnis Tionghoa dengan etnis Bugis Makassar. Pemukiman yang homogen ini seolah membatasi ruang gerak pergaulan mereka, menghambat proses komunikasi, menjadikan mereka eksklusif dan teralienasi.

Keragaman suku terkadang sulit dipersatukan. Masing-masing cenderung bertahan dengan pandangan sempit dan egoisme kesukuan mereka yang acap kali justru menimbulkan gesekan-gesekan yang berujung pada konflik kekerasan hingga kerusuhan, seperti konflik antara etnis Tionghoa dan Bugis Makassar yang pernah terjadi pada tahun 1970-an. Kerusuhan serupa juga terjadi beberapa kali pada dekade ini, meski hanya disebabkan hal yang sepele, misalnya dalam hubungan jual-beli. Salah satu pihak merasa tidak puas dan melakukan provokasi.



Gambar 1 Gapura “Tionghoa Town, Gerbang Persaudaraan Indonesia-Tionghoa” di Makassar

Konflik tahun 1980 merupakan konflik terparah. Konflik tersebut berawal dari peristiwa pembunuhan terhadap pembantu rumah tangga pribumi yang bekerja di sebuah toko Tionghoa “Toko La”. Peristiwa ini mengakibatkan kerusuhan dan penggayangan etnis Tionghoa di Makassar. Peristiwa serupa kembali terjadi pada tahun 1997. Peristiwa ini dipicu pembunuhan seorang bocah perempuan pribumi berusia sembilan tahun yang dilakukan oleh Benny Karre, etnis Tionghoa yang belakangan diketahui mengidap penyakit *Schizophrenia Paranoid*, semacam penyakit gangguan jiwa. Pelaku kemudian meninggal setelah dikeroyok massa yang mengamuk tidak terkendali. Aksi anti Tionghoa ini berlanjut dan meluas tidak saja pada perusakan serta pembakaran bangunan dan perumahan milik warga etnis Tionghoa, tetapi juga pada tempat-tempat hiburan (Sudarjanto, 2010).

Era reformasi mencatat insiden serupa. Pada 10 Mei 2006, seorang pembantu dari etnis Bugis terbunuh oleh etnis Tionghoa, yang lagi-lagi memicu kemarahan masyarakat. Pada 1 Juli 2007, seorang dosen Universitas Negeri Makassar dikeroyok oleh tiga orang etnis Tionghoa. Kejadian ini menimbulkan amarah sekelompok mahasiswa dan melakukan *sweeping* serta memprovokasi masyarakat untuk melakukan penggayangan etnis Tionghoa di Makassar. Kasus-kasus lain dengan modus yang sama pun terjadi, seperti peristiwa Jalan Latimojong dan Jalan Sangir.

Hingga Mei 2011, peristiwa serupa

pun masih terjadi. Penganiayaan yang diduga dilakukan seorang majikan beretnis Tionghoa berbuntut kematian salah seorang pembantu rumah tangga asal Sinjai. Meski tidak menimbulkan kerusuhan hebat seperti kasus-kasus sebelumnya, peristiwa ini membuat kota Makassar menjadi tegang karena aksi-aksi demo memprotes kejadian ini. Seolah tidak ingin menjadi korban seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebagian besar toko milik warga keturunan Tionghoa tutup lebih awal, termasuk di pusat penjualan emas di Jalan Somba Opu.

Sejarah juga mencatat bahwa Makassar adalah kota pertama di Indonesia yang menjadi lokasi penggayangan orang-orang keturunan Tionghoa pada 10 November 1965. Tindakan rasialis warga Bugis Makassar itu untuk melampiaskan kemarahan mereka pada peristiwa G30S dan terhadap poros Jakarta-Beijing yang dibangun pemerintahan Orde Lama. Sejak itu, kota Makassar menjadi lokasi paling sering terjadi kerusuhan rasial etnis Tionghoa (Pasolle, 2009).

Beberapa peristiwa yang memicu kerusuhan disebabkan oleh kemarahan warga pribumi (Bugis Makassar) terhadap pembunuhan etnis pribumi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa. Padahal, jika ditelusuri secara mendalam, kasus-kasus ini sebenarnya murni kriminal. Namun kasus-kasus itu selalu dikaitkan dengan isu-isu berbau SARA yang dilakukan oleh etnis minoritas terhadap etnis mayoritas. Hal ini terkesan tidak adil, karena kasus serupa yang dilakukan oleh etnis Bugis Makassar terhadap etnis Tionghoa nyaris

tidak pernah terekspose dan dianggap sebagai kasus kriminalitas biasa. Walau bagaimana pun, peristiwa kerusuhan semacam itu jelas menimbulkan ketakutan dan trauma luar biasa bagi warga etnis Tionghoa di Makassar. Tidak heran jika mereka bersikap sangat tertutup terhadap orang pribumi (Bugis Makassar).

Mendeteksi Akar Masalah: Stereotip dan Prasangka

Hubungan warga etnis Bugis Makassar dan Tionghoa di Makassar sebenarnya harmonis. Namun jika terjadi suatu masalah, baik bersumber dari etnis Tionghoa atau tidak, warga etnis Tionghoa selalu menjadi sasaran. Kecemburuan sosial dan hubungan harmonis yang semula menjadi masalah terpendam antara kedua etnis.

Penelitian yang dilakukan Sanjatmiko (1999, h. 1) tentang kasus etnis keturunan Tionghoa dan pribumi di Tangerang menyimpulkan beberapa faktor penyebab terjadinya jarak sosial antara etnis pribumi dan keturunan Tionghoa. Faktor tersebut antara lain, *pertama*, tidak terjadi perubahan pola kultur etnis keturunan Tionghoa ke dalam penduduk pribumi, atau masih kuatnya *in group feeling* penduduk etnis keturunan Tionghoa terhadap kulturetnya. *Kedua*, anggapan kultur etnis keturunan Tionghoa lebih tinggi dari komunitas pribumi. *Ketiga*, prasangka stereotip negatif terhadap penduduk pribumi yang pemalas, bodoh, dan tidak bisa menggunakan kesempatan baik. Sebaliknya, stereotip penduduk etnis pribumi terhadap etnis

keturunan Tionghoa juga muncul, seperti etnis keturunan Tionghoa disebut sebagai golongan yang mau untung sendiri tanpa melihat halal atau haram, diskriminasi pribumi terhadap etnis keturunan Tionghoa dalam kesempatan menduduki jajaran aparat desa/pemerintahan, serta nilai-nilai dan kekuatan konflik yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan agama dan kesenjangan ekonomi di antara kedua etnis. Hal ini menggambarkan bahwa kasus-kasus diskriminasi etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia memiliki akar masalah yang hampir sama di semua daerah, termasuk di Makassar.

Faktor stereotip dan prasangka yang sangat kuat pada etnis Tionghoa dan Bugis Makassar menarik untuk dibahas. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lepore dan Brown (dalam Baron, Byrne & Branscombe, 2006), stereotip berhubungan dengan prasangka. Prasangka mengaktifkan stereotip dan stereotip menguatkan prasangka. Sebagai golongan minoritas dan pendatang, menurut Suryadinata (2002), masyarakat etnis Tionghoa mempunyai beberapa stereotip yang melekat di mata penduduk pribumi, seperti curang, pelit, pencuriga, jorok, rajin, dan loyal pada keluarganya. Tidak hanya masyarakat pendatang yang mempunyai stereotip pada dirinya, masyarakat pribumi seperti etnis Jawa juga mempunyai stereotip tersendiri seperti sopan, jujur, tradisional, dan rajin.

Baron dan Byrne (2004, h. 213) mendefinisikan prasangka sebagai sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata berdasarkan

keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Prasangka merupakan salah satu fenomena yang hanya bisa ditemui dalam kehidupan sosial. Seseorang tidak mungkin berprasangka bila tidak pernah mengalami kontak sosial dengan individu lain. Prasangka memiliki fungsi heuristik (jalan pintas), yaitu langsung menilai sesuatu tanpa memprosesnya secara terperinci dalam alam pikiran (kognisi) kita. Gunanya adalah agar kita tidak terlalu lama membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang telah terlebih dahulu kita ketahui dampaknya (Sarwono, 2006, h. 129). Masalahnya, sering sekali orang berprasangka secara berlebihan sehingga orang tersebut tidak rasional lagi dan akhirnya membuat keputusan yang keliru.

Stereotip merupakan generalisasi tentang kelompok orang yang sangat menyederhanakan realitas, sedangkan prasangka merupakan sikap yang kaku terhadap suatu kelompok yang didasarkan pada keyakinan atau prakonsepsi yang keliru. Prasangka juga dapat dipahami sebagai penilaian yang tidak didasari oleh pengetahuan atau pengujian terhadap informasi yang tersedia.

Stereotip dan prasangka yang berkembang pada etnis Tionghoa dan Bugis Makassar cenderung ke arah penilaian yang negatif. Etnis Bugis Makassar beranggapan bahwa dalam berbisnis etnis Tionghoa sering bermain curang dan suka menyuap pihak penguasa untuk mendapatkan konsesi ekonomi sehingga membuat mereka cepat sukses. Lalu jika ada etnis Tionghoa datang untuk berbisnis di suatu wilayah, maka

mereka juga segera mendatangkan rekan-rekannya sesama etnis Tionghoa untuk berbisnis di daerah itu dan mematikan bisnis warga pribumi. Akibatnya, di banyak tempat, etnis Tionghoa dilarang melakukan perdagangan. Sebaliknya etnis Tionghoa menganggap mereka lebih tinggi dari komunitas pribumi dan menganggap etnis pribumi pemalas, bodoh, dan tidak bisa menggunakan kesempatan dengan baik.

Selama ini, konflik etnik Tionghoa dan Bugis Makassar sering muncul karena adanya anggapan warga bahwa keturunan Tionghoa kebal hukum, terutama pada kalangan yang mapan. Orang Tionghoa kebanyakan menyelesaikan persoalan hukum dengan membayar para aparat penegak hukum karena kaya dan memiliki banyak uang. Interaksi warga keturunan Tionghoa dengan etnik Bugis Makassar selama ini kurang intens, terutama di area tempat tinggal, karena masing-masing hidup secara berkelompok. Warga keturunan Tionghoa menutup diri dengan rumah tertutup serta menjunjung dan memelihara budaya nenek moyang. Sebaliknya etnik Bugis Makassar memendam stigma dan prasangka bahwa keturunan Tionghoa egois dan hanya mementingkan untung rugi bila berhubungan dengan tetangga (Oldnabble, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Mustamin (2006) yang berjudul "Kerawanan Kerusakan Etnis Bugis-Makassar dan Tionghoa di Kotamadya Makassar Sulawesi Selatan" menguatkan stigma yang selama ini dipahami oleh kedua etnis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kekerasan berdasarkan sentimen etnis dibangun oleh kondisi struktural dengan dominasi etnis Tionghoa dalam bidang perdagangan yang tidak tersaingi oleh etnis Bugis Makassar. Sementara itu, etnis Bugis Makassar mendominasi bidang politik yang strategis bagi kebijakan dalam bidang sosial. Ketiadaan satu media yang mempertemukan etnis Tionghoa dan etnis Bugis Makassar adalah realitas yang melahirkan persepsi dan prasangka. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata justru memperkuat simbol-simbol identitas primordial etnis Tionghoa dan etnis Bugis Makassar, sehingga potensi kekerasan menjadi bersifat laten. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan suatu model pencegahan konflik kerusuhan dengan inisiatif lokal melalui pembentukan lembaga lintas etnis.

Hal inilah yang disebut Samovar dan Porter (1985, h. 78) sebagai suatu sikap kaku terhadap sekelompok orang berdasarkan keyakinan yang salah, pemikiran sederhana yang dilebih-lebihkan, dan secara emosional kaku dan sulit untuk diubah. Hal ini memicu penghindaran diri dari setiap kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang yang tidak disukainya. Di samping itu, kondisi tersebut juga membuat perbedaan (diskriminasi) melalui tindakan-tindakan aktif serta permusuhan sebagai bentuk manifestasi prasangka. Tidak dipungkiri bahwa stereotip dan prasangka ini terbentuk berdasarkan pengalaman interaksi dengan individu lain atau kelompok individu tertentu. Pengalaman

etnis Tionghoa mendapat perlakuan tertentu dari suku Bugis Makassar begitu kuat membentuk stereotip dan prasangka mereka. Begitu pula sebaliknya.

Stereotip dan prasangka ini pula yang memengaruhi komunikasi antar budaya Tionghoa dan Bugis Makassar. Etnis Tionghoa cenderung melakukan usaha penghindaran untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak diinginkan. Salah satu bentuk penghindaran tersebut adalah pembangunan rumah tempat tinggal yang sangat tertutup dan seolah-olah tidak ingin bersentuhan langsung dengan dunia luar. Kebanyakan dari mereka juga menghindari urusan dengan pribumi, seperti saat pengurusan surat-surat, mereka lebih memilih menggunakan calo. Bahkan anak-anak etnis Tionghoa disekolahkan di sekolah-sekolah swasta yang khusus untuk etnis tersebut. Sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada anak-anak etnis Tionghoa yang bersekolah di sekolah-sekolah negeri yang banyak mendidik anak-anak pribumi. Perbedaan-perbedaan semacam itu melahirkan pemikiran dari kedua etnis tersebut: adakah keuntungan yang bisa mereka peroleh jika saling berhubungan dan berkomunikasi?

Berdasarkan hasil penelitian Fatimah (2010) yang berjudul "Aspek Stereotip dalam Komunikasi Multikultur di Makassar", disebutkan bahwa pola perilaku antara etnis Tionghoa dan Bugis Makassar yang berlangsung selama ini kurang harmonis karena kedua etnis jarang berhubungan dan berkomunikasi. Bila berhubungan, masing-masing anggota etnis ternyata masih

memikirkan untung-ruginya. Keuntungan dapat dilihat dalam bentuk yang nampak (barang dan tenaga) dan yang tidak tampak (perasaan). Kerugian diperoleh juga dalam bentuk yang sama, tetapi karena ketertutupan etnis Tionghoa untuk menyebutkan langsung kerugiannya sehingga hal itu sulit untuk diungkapkan. Hal ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa sangat tertutup dalam memberikan informasi. Problem utamanya adalah ketidakmampuan mempercayai atau secara serius menganggap pandangan sendiri keliru dan pendapat orang lain benar. Komunikasi berada pada posisi terpolarisasi dan ditandai dengan retorika 'kami yang benar' dan 'mereka yang salah'. Kata lainnya, setiap kelompok budaya cenderung etnosentrik (Gudykunst & Kim, 1992, h. 98).

Penjelasan di atas berhubungan erat dengan model komunikasi yang dipaparkan oleh Gudykunst dan Kim. Proses penyandian dan penyandian balik pesan dipengaruhi oleh filter-filter konseptual yang dibagi-bagi menjadi faktor budaya, sosiobudaya, psikobudaya dan lingkungan (Mulyana, 2005, h. 156). Dari perbedaan budaya, ada banyak faktor yang dapat dilihat. Salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan individu yang disebabkan oleh nilai-nilai dan tradisi yang dibawanya. Menurut Purwasito (2003, h. 224-231) kebiasaan-kebiasaan individu inilah yang akan membentuk suatu pemikiran khusus mengenai kultur tertentu. Untuk memahami latar belakang budaya, dalam konteks komunikasi, ada beberapa faktor yang perlu dipahami, yaitu pola berpikir masing-

masing individu, stereotip, etnosentrisme, tradisi, nilai, norma, dan sistem religi.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa, dalam berkomunikasi, setiap anggota etnis akan berpedoman pada norma-norma, kaidah-kaidah, dan budaya etnisnya. Di dalam masyarakat Bugis Makassar maupun Tionghoa jelas terdapat berbagai nilai, norma, kaidah, tradisi, serta budaya bawaan yang dijadikan pedoman berkomunikasi oleh masing-masing etnis. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut memicu terjadinya benturan-benturan dan gesekan-gesekan dalam komunikasi antar budaya yang berujung pada timbulnya konflik.

Solusi Masalah: Komunikasi

Manusia selalu berkomunikasi dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berasal dari satu kelompok maupun kelompok, ras, etnik, dan budaya lain. Aksioma komunikasi mengatakan bahwa manusia selalu berkomunikasi dan manusia tidak dapat menghindari komunikasi (Liliwiri, 2004, h. 5).

DeVito (1997, h. 482) berpendapat bahwa komunikasi antar budaya telah menjadi semakin penting karena meningkatnya mobilitas orang di seluruh dunia, saling ketergantungan ekonomi antar negara, kemajuan teknologi komunikasi, perubahan pola imigrasi, dan politik membutuhkan pemahaman atas kultur yang berbeda-beda. Sedangkan Liliwiri (2004, h. 56) mengatakan bahwa hidup bermasyarakat memaksa manusia untuk berkomunikasi, baik dengan anggota kelompok maupun dengan manusia di luar kelompok yang

dinaunginya. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi di antara sejumlah orang. Pada kenyataannya, komunikasi kelompok bukanlah sekedar bertukar pesan melainkan terjadi pula proses interaksi antar budaya dari para anggota kelompok (baik *in group* maupun *out group*) yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Termasuk dalam pengertian konteks komunikasi kelompok adalah operasi komunikasi antar budaya di kalangan *in group* maupun antara anggota sebuah *in group* dengan *out group* atau bahkan antara berbagai kelompok.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, lebih dari ratusan etnis tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan lebih dari 350 bahasa daerah berkembang di Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya akan beragam suku bangsa, bahasa, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Namun, komunikasi antar budaya di negeri ini belum mendapatkan tempat yang cukup serius sebagai suatu kajian penting. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia sangatlah heterogen.

Kehidupan majemuk bangsa Indonesia ditandai dengan etnis yang berbeda-beda latar belakang sosial-budayanya. Kenyataan tersebut membuat bangsa Indonesia tidak mudah mewujudkan suatu integrasi dan menghindari konflik atau bahkan perpecahan (DeVito, 1997, h. 5). Komunikasi antar budaya melibatkan perbedaan-perbedaan ras dan etnis, namun dapat juga berlangsung ketika muncul perbedaan-perbedaan yang mencolok tanpa harus disertai perbedaan-

perbedaan tersebut. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, komunikasi antar budaya dipahami sebagai proses simbolik yang melibatkan atribusi makna antar individu dari budaya yang berbeda. Kata kuncinya adalah proses (Gudykunst and Kim, 1992, h. 157).

Bruneau mengatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan komunikasi antar budaya harus mempunyai keinginan yang jujur dan tulus agar tercipta hubungan yang harmonis (Mulyana & Rachmat, 1990, h. 56). Asumsi ini memerlukan sikap yang positif dari para pelaku komunikasi antar budaya untuk menghilangkan hubungan *superior-inferior* berdasarkan keanggotaan kelompok-kelompok etnis tertentu. Saling pengertian dan pemahaman di antara masing-masing pihak harus tercipta karena memperlakukan orang lain yang berbeda budaya sesuai dengan keinginannya dapat mempermudah terjadinya komunikasi di antara mereka.

Komunikasi antar budaya merupakan hubungan antara individu-individu yang berbeda budaya, misalnya antar suku bangsa, etnik, ras, dan sosial (Samovar, Porter & Jaim, 1986, h. 25). Di dalam komunikasi antar anggota kelompok etnik, terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah yang terpelihara dan dipatuhi bersama oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma itu merupakan ikatan yang dihormati bersama. Oleh karena itu, dalam berperilaku, setiap anggota masyarakat akan selalu berpedoman pada norma-norma itu.

Kedua etnis yang berkonflik, yaitu Tionghoa dan Bugis Makassar, memahami

bahwa pengalaman masa lalu, di mana etnis Tionghoa selalu menjadi korban tindak kekerasan, enggan membuka diri dan berkomunikasi untuk menjalin interaksi dengan etnis pribumi (Bugis Makassar). Perasaan cemas, ketidakpastian, kecurigaan yang besar, dan pandangan negatif juga selalu menjadi hal yang mendasari etnis Tionghoa untuk menghindari komunikasi. Sebaliknya, etnis Bugis Makassar tetap memiliki rasa superior dibanding etnis Tionghoa karena mereka merasa bahwa etnis Tionghoa merupakan orang asing yang datang dan tinggal di wilayah mereka.

Biasanya, semakin besar derajat perbedaan antar budaya, maka akan semakin besar pula kemungkinan kehilangan peluang untuk merumuskan suatu tingkat kepastian sebuah komunikasi yang efektif. Gudykunst dan Kim (1984, h. 67) menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak dikenal atau asing selalu berusaha mengurangi tingkat ketidakpastian melalui peramalan yang tepat atas relasi antar pribadi. Usaha untuk mengurangi ketidakpastian itu dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain *precontact* atau tahap pembentukan kesan melalui simbol verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, *initial contact and impression*, yakni sebuah tanggapan lanjutan atas kesan yang ditimbulkan atau muncul dari kontak pertama tersebut. Terakhir, *closure*, mulai membuka diri melalui atribusi dan pengembangan kepribadian.

Stereotip dan prasangka dapat diminimalisir apabila setiap etnis dapat melakukan komunikasi secara terbuka melalui kontak antar persona maupun antar

kelompok dengan etnis yang berbeda. Sikap terbuka yang dibangun melalui kontak antar persona harus diimbangi dengan *feedback* yang positif dan kerjasama yang baik untuk mengurangi terbentuknya stereotip. Sebuah interaksi yang sebelumnya telah didasari atas prasangka, jika dilakukan terus-menerus akan menumbuhkan saling pengertian di antara kedua belah pihak, sehingga tindakan diskriminasi dapat diminimalkan. Menurut Barlo dan Devito, dalam Sihabuddin (2011, h. 204), efektivitas komunikasi antar pribadi dan antar kelompok sangat ditentukan oleh faktor keterbukaan, empati, serta perasaan positif yang memberikan dukungan dan memelihara keseimbangan.

Pada praktiknya, usaha menjalin komunikasi antar budaya bukanlah persoalan sederhana. Namun, kesalahpahaman budaya dapat diminimalkan jika kedua etnis berinteraksi dengan mengembangkan komunikasi antar budaya yang bermakna sebagai upaya untuk mereduksi perilaku stereotip, prasangka, dan etnosentris. Di samping itu, kebermaknaan dalam komunikasi antar budaya juga akan tercapai apabila kedua belah pihak dapat mengelola kecemasan dan ketidakpastian yang dihadapi sebagai sebab mendasar kegagalan komunikasi antar budaya. Kemampuan mengelola ketidakpastian dan kecemasan justru akan memberikan motivasi kepada individu-individu dalam mengurangi kesalahpahaman budaya. Jalinan komunikasi antara kedua belah pihak dengan demikian akan berlangsung dengan lebih baik.

Menurut Gudykunst (2002, h. 98), komunikasi efektif antara individu-

individu yang berbeda latar belakang budaya bukan dipahami karena terciptanya keakraban, berbagi sikap yang sama, atau bahkan berbicara yang jelas, tetapi komunikasi efektif terjadi saat kedua belah pihak dapat secara akurat memprediksikan dan menjelaskan perilaku masing-masing. Gudykunst menyatakan bahwa kecemasan dan ketidakpastian tidak selalu bermakna negatif, namun jika tingkatnya semakin rendah dapat memotivasi mereka untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Komunikasi yang telah berjalan baik dan efektif dapat berperan dalam menyebarkan keyakinan atau menghentikan penyebaran stereotip dan prasangka, bahkan rasisme, antara etnis Tionghoa dan etnis Bugis Makassar.

Penelitian yang dilakukan Idi (2009) juga menekankan pentingnya mengikis stereotip, prasangka, dan diskriminasi agar proses asimilasi (perpaduan dua budaya) dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan antar etnis. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah perbandingan kuantitas etnis minoritas yang harus lebih kecil dibandingkan mayoritas, terdapatnya sejumlah kesamaan budaya antara kelompok mayoritas dan minoritas serta kesanggupan etnis minoritas menghilangkan identitas mereka dan menerima etnis mayoritas.

SIMPULAN

Pembahasan di atas menyimpulkan bahwa salah satu jalan keluar dari masalah tersebut adalah perlunya pemahaman masyarakat mengenai kesadaran multi-

kulturalisme yang merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemahaman tersebut dapat muncul jika ditunjang dengan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat, baik itu beretnis Tionghoa, Bugis Makassar, maupun etnis lain yang hidup berdampingan. Pengembangan demokrasi di Indonesia perlu ditopang oleh kesadaran multikultural, yaitu kesediaan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Tanpa kesadaran tersebut, bangsa ini sulit membangun kemajuan di tengah masyarakat yang majemuk dalam hal agama, etnis, dan budaya.

Perbedaan merupakan keniscayaan yang mesti dan harus diterima. Fakta menunjukkan bahwa manusia memang makhluk unik dan khas. Keunikan dan kekhasan ini, dalam konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, dapat menimbulkan keragaman tatanan sosial dan kebudayaan. Keragaman ini seperti ditunjukkan oleh Indonesia sebagai negara-bangsa yang terdiri atas beragam etnis, agama, dan bahasa. Keragaman ini perlu dikelola secara serius dan sungguh-sungguh dalam suatu bentuk tatanan nilai yang dapat dibagi bersama. Oleh karena itu, keragaman masyarakat Indonesia merupakan tantangan yang menuntut upaya sungguh-sungguh dalam bentuk transformasi kesadaran multikultural. Suatu kesadaran yang diarahkan untuk membangun identitas nasional, integrasi nasional, dan kesadaran menempatkan agama untuk kesatuan bangsa. Ini akan membuat kesatuan Indonesia dapat ditegakkan sejalan dengan teks ideal Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu keterbukaan yang masih dipertahankan untuk menjalin interaksi dan komunikasi antara etnis Tionghoa dan Bugis Makassar di Makassar antara lain ritual *Mattemu Taung*. Kegiatan ini mungkin dapat menjadi salah satu cara yang bisa dipakai oleh kedua etnis untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis. Ritual yang setiap tahun diadakan bertepatan bulan Syafar penanggalan Hijriyah ini merupakan penghormatan dan pemujaan terhadap leluhur. Upacara ini diselenggarakan oleh beberapa keluarga besar keturunan Tionghoa di Makassar. Tujuannya untuk memohon keselamatan bagi seluruh masyarakat. Di dalam prosesnya, ritual ini memadukan tradisi Bugis dan Tionghoa karena dahulu ada leluhur warga keturunan Tionghoa yang menikah dengan keluarga kerajaan Luwu, salah satu kerajaan besar di tanah Bugis. Ini berarti etnis Tionghoa sejak dahulu telah diterima dan memperoleh pengakuan sederajat tanpa melihat atau mempersoalkan adanya perbedaan antara etnis Bugis dan Tionghoa (Pasolle, 2009).

Pemerintah kota Makassar, bekerja sama dengan paguyuban-paguyuban etnis Tionghoa dan Bugis Makassar, sering menyelenggarakan berbagai forum diskusi pluralisme tentang pembauran Etnis Tionghoa di Makassar. Tujuannya untuk membuka komunikasi dan interaksi antar kedua etnis. Di samping itu, untuk membangun kembali kepercayaan dengan sesama warga lainnya, tokoh-tokoh warga Tionghoa di Makassar selalu berusaha bekerja sama dengan pemerintah dan tokoh lintas etnis lainnya, misalnya dengan

membuat kegiatan-kegiatan yang bisa dihadiri seluruh lapisan masyarakat, seperti perayaan Imlek dan Cap Go Meh yang digelar setiap tahun. Di sisi lain, Forum Pembauran Kebangsaan Sulawesi Selatan juga selalu menggelar kegiatan-kegiatan yang membaurkan kedua etnis, misalnya dengan menghadirkan Grup Sendratasik yang menyanyikan lagu-lagu Bugis Makassar, tetapi yang beraliran musik Tionghoa (Tionghoa Indonesia, 2010, h. 9). Seiring era reformasi, kehidupan multietnik di Makassar, khususnya Tionghoa dan Bugis Makassar, semakin membaik, terutama setelah beberapa peraturan pemerintah menganulir peraturan lama yang sebelumnya membuat etnis Tionghoa hidup dalam lingkup terbatas. Peraturan baru tersebut, misalnya, menjadikan Imlek sebagai hari besar keagamaan, pengakuan Konghucu sederajat dengan agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, undang-undang kewarganegaraan, kebebasan berekspresi, dan mengembangkan kebudayaan. Hal tersebut menggambarkan bahwa semua etnik/suku bangsa yang menjadi warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam segala hal.

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2014, pernah mengatakan bahwa jangan ada lagi tembok pemisah antara etnis Tionghoa dengan yang bukan. Kita, sebagai anak bangsa, dapat menjaga suasana tetap aman dan damai sehingga ekonomi akan menjadi lebih baik. Kesatuan emosional dan persatuan semua masyarakat dapat membaik dengan tidak menghadirkan

tembok pemisah antara warga Tionghoa dengan etnis lainnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Ilham mengemukakan bahwa merayakan Imlek menjadi pertanda semakin mengakarnya kebersamaan antara semua suku atau etnis. Menurutnya, keberadaan etnis Tionghoa di Makassar tidak bisa dipisahkan dan menjadi bagian dari warga Kota Makassar dalam membangun kehidupan melalui kebersamaan dan persatuan yang kian erat.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Sulawesi Selatan, Wilianto Tanta, menuturkan bahwa kegiatan seperti perayaan Imlek bukan hanya sebagai ajang silaturahmi bagi warga Tionghoa, tetapi juga untuk semua masyarakat, khususnya di Makassar. Perbedaan antara warga Tionghoa dengan lainnya tidak ada lagi. Semuanya sama. Kita berharap, warga Tionghoa bisa bergabung dengan seluruh masyarakat. Tidak ada lagi sekat-sekat pemisah dengan etnis Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, dan lainnya. Kita anggap semuanya sama sebagai masyarakat Sulawesi Selatan (Berita Kota, 2014).

Indonesia, sebagai negara multikultur, telah berupaya menangani berbagai konflik sosial dan etnis, misalnya dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik. Melalui regulasi tersebut, diharapkan konflik bisa ditangani secara baik. Penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana, baik sebelum, saat berlangsung, maupun

sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Penyelesaian konflik antara etnis Tionghoa dan Makassar misalnya melalui mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah Makassar. Selain terdapat kompromi-kompromi untuk mencapai kesepakatan bersama agar konflik tidak terjadi lagi, pemerintah kota Makassar juga menggunakan *win-win solution* di mana kedua belah pihak yang bertikai sama-sama mendapatkan keuntungan dan kedamaian.

Masalah konflik antar etnis dapat terselesaikan jika ada kesediaan dari masing-masing etnis untuk terbuka, baik dalam komunikasi maupun sikap terhadap segala hal yang baru. Hal ini penting karena melalui keterbukaan tersebut setiap etnis bisa memupuk kepekaan untuk saling menghargai, tidak diskriminatif, serta mengikis stereotip dan prasangka yang telah mengakar pada masing-masing etnis. Itulah salah satu cara untuk merayakan multikulturisme.

DAFTAR RUJUKAN

- Baron, R.A., & Byrne, D. (2004). *Psikologi sosial*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Baron, R.A., Byrne, D. & Branscombe, N. R. (2006). *Social psychology* (11th ed.). Belmont, CA: Pearson Education Inc.
- Berita Kota. (2 Maret 2014). *Jangan lagi ada tembok pemisah antar etnis*. <http://beritakotamakassar.com/Arsip/index.php?option=com_content&view=article&id=20799:jangan-lagi-ada-tembok-pemisah-antar-etnis>
- Brown, M. (1997). Causes and implications of ethnic conflict. Dalam Guibernau & Rex,

- J (Eds), *The ethnicity reader: Nationalism, multiculturalism, and migration*. Great Britain, UK: Polity Press.
- Budiman. (20 Maret 2004). Review buku Prof. Amy Chua. *Kompas*, h. 45.
- DeVito, J. (1997). *Komunikasi antar manusia*. Jakarta, Indonesia: Professional Books.
- Fatimah, J. M. (2010). Aspek stereotip dalam komunikasi multikultur di Makassar. *Jurnal Pekommas*, 13(1).
- Gudykunst, W. (2002). Cross-cultural communications theories. Dalam Gudykunst, W. B. & Mody, B (Eds), *Handbook of international and intercultural communication* (2nd ed.). London, UK: Sage Publications.
- Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (1984). *Methods for intercultural communication*. Beverly Hills, CA: Sage.
- (1992). *Readings on communicating with strangers*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Helmi, A. F. & Soedardjo. (1998). *Beberapa perspektif perilaku agresif*. <http://avin.staff.ugm.ac.id/data/jurnal/perspektifagresi_avin.pdf>
- Idi, A. (2009). *Asimilasi Tionghoa Melayu di Bangka*. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.
- Liliweri, A. (1994). Prasangka sosial dan efektivitas komunikasi antar etnik di Kupang. Dalam Liliweri, A (Ed), *Perspektif pembangunan: Dinamika dan tantangan pembangunan Nusa Tenggara Timur*. Kupang, Indonesia: Penerbit Yayasan Citra Insan Pembaru.
- , A. (2004). *Dasar-dasar komunikasi antarbudaya*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Makassar Doeloe Makassar Kini Makassar Nanti. (2000). Makassar, Indonesia: Yayasan Losari.
- Mulyana, D. & Rakhmat, J. (1990). *Komunikasi antarbudaya: Panduan berkomunikasi bagi orang-orang berbeda budaya*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung, Indonesia: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mustamin. (2006). Kerawanan kerusuhan etnis Bugis-Makassar dan Tionghoa di kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan. *Center for Religious and Cross-Cultural Studies UGM*. <<http://crcs.ugm.ac.id/thesis/48/Kerawanan-Kerusuhan-Etnis-Bugis-Makassar-dan-Tionghoa-di-Kotamadya-Makassar-Sulawesi-Selatan.html>>
- Oldnabble. (2 Februari 2010). *Asa pada keterlibatan politik etnis Tionghoa*. <<http://old.nabble.com/-sastrapembebasan/Asa-pada-Keterlibatan-PolitikEtnis-Tionghoa-td15100025.html/2/Februari/2010>>
- Pasolle. (1 Januari 2009). *Merayakan multikulturisme dengan ritual Mattemmu Taung sebuah perpaduan tradisi Bugis dan Tionghoa di Makassar*. <<http://pasolle.blogspot.com/2009/01/pasolle-2.html/Merayakan>>
- Prihartanti, N., Taufik & Thoyibi, M. (2009). *Mengurai akar kekerasan etnis pada masyarakat pluralis*. <<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/643/1.%20NANIK.pdf?sequence=1>>
- Purwasito, A. (2003). *Komunikasi multikultur*. Surakarta, Indonesia: Muhammadiyah University Press.
- Rahman, N. E. (2013). Konflik dan kecemburuan sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat Pandhalungan di daerah Besuki-Situbondo. *Prosiding The 5 th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Indonesia. <<http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-02-15.pdf>>
- Samovar, L. A. & Porter, R. E. (1985). Approaching intercultural communication. Dalam L. A. Samovar and R. Porter (Eds.), *Intercultural communication: A reader* (4th ed.), Belmont, CA: Wadsworth.
- Samovar, L. A., Porter, R. E. & Jaim, N. C. (1986). *Understanding intercultural communication*.

- Belmon, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Sanjatmiko, P. (1999). Orang keturunan Tionghoa di Tangerang: Suatu kajian tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat asimilasi antara penduduk golongan etnik pribumi. Makalah *Jurnal Penelitian Universitas Indonesia*, C(3), ISSN 1410-2595.
- Sarwono, S. W. (2006). *Psikologi prasangka*. Jakarta, Indonesia: C.V. Rajawali.
- Sihabuddin, A. (2011). *Komunikasi antarbudaya: Satu perspektif multidimensi*. Jakarta, Indonesia: PT. Bumi Aksara.
- Siregar, A. T. H. (12 Januari 2013). *Mempertajam perbedaan, menjalankan toleransi: Tentang asimilasi, integrasi, dan taman budaya Tionghoa*. <<http://indonesiaseutuhnya.wordpress.com/2013/01/12/mempertajam-perbedaan-menjalankan-toleransi/>>
- Sudarjanto. (5 Oktober 2010). *Penyelesaian konflik antar etnis terhadap etnis Tionghoa-Makassar*. <<http://direktori.umy.ac.id/uploads/skripsi2/20050530241-Bab-I.pdf>>
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan etnis tionghoa (Kasus Indonesia)*. Jakarta, Indonesia: LP3ES.
- Tionghoa Indonesia. (2 Februari 2010). *Fajar*, h. 9.
- Yaqin, M. A. (2005). *Pendidikan multikultural: Cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta, Indonesia: Pilar Media.